

MEKANISME HUBUNGAN *STAKEHOLDERS* DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA TANGKAHAN

Muhammad Irfan Lubis¹, E.K.S Harini Muntasib², Rinekso Soekmadi²

¹) Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Dramaga, Bogor, 16680, Indonesia

²) Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Dramaga, Bogor, 16680, Indonesia
Email: abiyuharis@apps.ipb.ac.id

RINGKASAN

Ekowisata Tangkahan adalah salah satu Ekowisata yang terkenal di Taman nasional Gunung Leuser. Banyak pihak yang ikut berperan dalam pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme hubungan para pihak yang ikut mengelola di Ekowisata Tangkahan. Metode yang digunakan adalah pemetaan *stakeholders*, analisis *stakeholders*, dan sintesis dengan merumuskan mekanisme hubungannya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat sebagian *stakeholders*, seperti Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) Kabupaten Langkat, dan Lembaga Pariwisata Tangkahan (LPT) yang menjadi pemain kunci dengan pengaruh dan kepentingan tertinggi.

Kata kunci: analisis *stakeholder*, Ekowisata Tangkahan, Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL)

STAKEHOLDERS RELATIONSHIP MECHANISM IN TANGKAHAN ECOTOURISM DEVELOPMENT

ABSTRACT

Tangkahan Ecotourism is one of the famous ecotourism in Gunung Leuser National Park. Many parties take part in its management. This study aims to determine the mechanism of the relationship of the parties who participate in managing Tangkahan Ecotourism. The method used is stakeholder mapping, stakeholder analysis and synthesis are also carried out by formulating the relationship mechanism. The results of the research show that several stakeholders, such as The Mount Leuser National Park Center, Tourism and Culture Office of Langkat Regency, and Tangkahan Tourism Institute are the key players with the highest influence and interest.

Keywords: *Mount Leuser National Park, stakeholder analysis, Tangkahan ecotourism*

PERNYATAAN KUNCI

- Ekowisata Tangkahan merupakan salah satu ekowisata yang mengola-

borasikan kearifan masyarakat lokal dengan kawasan konservasi. Kolaborasi ini telah berhasil mengubah

pandangan masyarakat lokal untuk mengurangi praktik yang merusak alam dengan menjadikan kawasan ini sebagai salah satu ekowisata unggulan di Indonesia.

- Keberhasilan konsep Ekowisata Tangkahan tak lepas dari kolaborasi berbagai macam *stakeholders* yang ikut berperan mengembangkan kawasan ini.
- Perlu dilakukan identifikasi peranan, pola hubungan dan kebutuhan di antara *stakeholders* lainnya agar kolaborasi yang berjalan dapat lebih optimal dalam pengembangan Ekowisata Tangkahan dan menghindari gesekan konflik kepentingan di antara *stakeholders* terkait.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Keberhasilan pengembangan Ekowisata Tangkahan terletak pada identifikasi yang akurat terhadap keterlibatan pihak dan peran serta masyarakat, juga koordinasi yang baik antara lintas pemangku kepentingan baik dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan. Koordinasi yang baik diperlukan mengingat banyaknya program yang dikembangkan sehingga setiap program yang sedang direncanakan maupun dilaksanakan dapat terlaksana tanpa timpang tindih.

Upaya pengembangan Ekowisata Tangkahan perlu menerapkan pemetaan *stakeholder* pada bidang dan wilayah kerja masing-masing dalam rangka menghindari terjadinya konflik dan tumpang tindih

pengaruh dan kepentingan, serta dapat terwujudnya pengelolaan dan pengembangan ekowisata yang partisipatif dan kolaboratif. Hal tersebut dapat ditingkatkan dengan adanya perbaikan koalisi, sinergi, dan kerja sama antar pemangku kepentingan.

PENDAHULUAN

Ekowisata menjadi sesuatu yang diutamakan sebagai suatu strategi untuk membantu permasalahan yang berkaitan dengan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat-masyarakat lokal. Selain itu, ekowisata juga sebagai satu alat yang efektif dan yang sesuai bagi konservasi lingkungan (Garrod, 2003; Febriana dan Kaswanto, 2015; Rahayu dan Badiah, 2021). Ginting *et al.*, (2010) dan Muthiah *et al.*, (2015) juga mengungkapkan bahwa pengembangan ekowisata di areal kawasan taman nasional dapat menyebabkan adanya interaksi komunitas lokal dengan kawasan. Interaksi ini memberikan pengaruh dinamis terhadap kawasan dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas kehidupan dalam masyarakat dan sekaligus mengonservasi warisan alam dan budaya.

Salah satu upaya dalam mengatasi adanya permasalahan antara masyarakat dan taman nasional tersebut, Menteri Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa. Peraturan ini merupakan arahan pemerintah agar hutan dapat dikelola berbasis masyarakat yang paham mengenai

kearifan lokal dan arti penting keberadaan hutan dalam menjamin kehidupan mereka tentunya dengan tetap memegang aspek konservatif. Dengan demikian, kegiatan pengembangan konservasi ekowisata tidak mengganggu adat dan pola hidup masyarakat sekitar kawasan tersebut. Selain itu juga tidak mengganggu proses pemanfaatan, pemulihan, dan pengembangan kawasan. Hal tersebut dikarenakan ekowisata diharapkan mampu menopang kebutuhan ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar melalui sistem pengelolaan pada tiga aspek, yakni aspek ekologi, ekonomi, dan sumber daya.

Ekowisata Tangkahan menjadi salah satu ekowisata berkembang yang menopang kebutuhan ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitarnya. Beragam wisata alam berada di kawasan Tangkahan ini. Wisatawan yang datang dapat merasakan sensasi alam liar dan natural. Perkembangan Ekowisata Tangkahan menjadi salah satu bukti progresif dari pengaruh Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.49/Menhut-II/2008. Hal ini dikarenakan dahulu masyarakat sekitar Ekowisata Tangkahan melakukan *illegal logging* sebagai salah satu pendapatan utama. Namun, sejak Tangkahan dicanangkan sebagai kawasan ekowisata, secara perlahan pola pikir masyarakat sekitar berubah untuk menghentikan aktivitas-aktivitas ilegal tersebut. Sebaliknya, masyarakat bersama *stakeholders* mengelola Tangkahan menjadi pusat riset hingga pada akhirnya terealisasi sebagai

ekowisata. Banyak pihak yang berperan dalam pengelolaan ekowisata di Tangkahan, sehingga penelitian ini akan melakukan identifikasi peranan, pola hubungan dan kebutuhan *stakeholders*. Beberapa *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan pengelolaan Ekowisata Tangkahan, di antaranya adalah lembaga pemerintah, organisasi/kumpulan masyarakat, dan lembaga non-pemerintah. *Stakeholders* yang terlibat memiliki peran, kepentingan dan pengaruh masing-masing di dalam pengembangan pengelolaan Ekowisata Tangkahan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi peranan, pola hubungan, dan kebutuhan antar *stakeholders*.

SITUASI TERKINI

Hasil inventarisasi *stakeholder* menggunakan metode wawancara dan *snowball* menunjukkan bahwa *stakeholder* yang terlibat dalam perencanaan partisipatif ekowisata Tangkahan bervariasi seperti yang diilustrasikan pada Tabel 1. *Stakeholder* Tangkahan yang teridentifikasi pada penelitian terdiri atas golongan kelompok pemerintah [Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) Kabupaten Langkat, Desa Namo Sialang, Desa Sei Serdang, PTPN II dan *Conservation Respon Unit* (CRU)], masyarakat [Lembaga Pariwisata Tangkahan (LPT), tokoh masyarakat, *Ranger*] dan non pemerintah (CTO Sumatera Tour & Travel dan CTO Bukit Lawang Tour).

Tabel 1. *Stakeholder* pengelola Ekowisata Tangkahan

No	<i>Stakeholder</i>	Pemerintah	Masyarakat	Non pemerintah
1	Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL)	√		
2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) Kabupaten Langkat	√		
3	Desa Namo Sialang	√		
4	Desa Sei Serdang	√		
5	Lembaga Pariwisata Tangkahan		√	
6	PT Perkebunan Nusantara Dua (PTPN II)	√		
7	Tokoh Masyarakat		√	
8	<i>Conservation Respon Unit</i> (CRU)	√		
9	Ranger		√	
10	CTO Sumatera Tour & Travel			√
11	CTO Bukit Lawang Tour			√

Sumber: Data primer, diolah

Penanggung jawab pengelolaan ekowisata Tangkahan saat ini berada pada institusi BBTNGL. Dapat dikatakan, institusi tersebut berperan sebagai pengelola utama Ekowisata Tangkahan. Namun, dalam pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan program pemerintah, BBTNGL dibantu Disbudpar Kabupaten Langkat sebagai perantara program di tingkat provinsi maupun kabupaten.

LPT merupakan lembaga berbasis masyarakat dari dua desa yang didukung oleh otoritas kawasan dalam hal ini BBTNGL melalui penandatanganan nota Perjanjian Kerjasama (PKS) antara LPT dengan BBTNGL tentang pengelolaan kawasan ekowisata. PKS dimulai sejak 2002 dan diperbaharui setiap lima tahun sekali. Bentuk kerjasama LPT dengan BBTNGL meliputi perlindungan kawasan di wilayah kerja resor

Tangkahan dan sekitarnya, serta pemanfaatan jasa layanan wisata dalam lingkup kemitraan di wilayah kelola. Objek kerjasamanya berupa konservasi, ekonomi dan sosial budaya. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah 1) pengawetan dan pemanfaatan kawasan konservasi TNGL yang meliputi wilayah kerja Resor Tangkahan; 2) pengembangan sistem ekonomi lingkungan melalui usaha ekowisata TNGL; 3) penyelenggaraan kegiatan atau program bagi masyarakat Desa Namo Sialang dan Desa Sei Serdang yang berbatasan langsung dengan kawasan sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian dan pengamanan hutan dan seluruh ekosistem di kawasan ekowisata. Kegiatan pengelolaan di kawasan Ekowisata Tangkahan pada dasarnya merupakan pengelolaan dengan manajemen satu pintu dengan LPT sebagai

muaranya. Sebagai lembaga pengelola LPT mewadahi beberapa unsur, yaitu *Community Tour Operator* (CTO) yang merupakan bagian pemasaran dari kawasan ekowisata serta *ranger* yang bertugas sebagai *guide/interpreter*, *ranger* yang bertugas sebagai tim penyelamat (SAR), dan *ranger* yang bertugas dalam usaha konservasi di kawasan ekowisata. Kerja sama dengan organisasi lain yang pernah dilakukan, yakni *Indonesian Ecotourism Network* (INDECON), *Conservation Response Unit* (CRU), *Veterinary Society for Sumatran Wildlife Conservation* (VESSWIC), Yayasan Simpul Indonesia, dan *The Johaniter*.

PTPN II merupakan perusahaan perkebunan milik BUMN yang berfokus di bidang perkebunan kelapa sawit dan berada di sekitar kawasan. Akses masuk Ekowisata Tangkahan harus melewati areal perkebunan PTPN II tersebut, yaitu bagian Unit kebun Kwala Sawit. Sebagian kecil masyarakat sekitar Tangkahan menjadi bagian dari pekerja di PTPN II. Dalam hal ini, Unit Kebun Kwala Sawit memiliki program kerja sama dengan pihak Tangkahan dan masyarakat khususnya LPT, di antaranya adalah penyediaan areal parkir untuk wisatawan, bantuan sosial terhadap masyarakat, pembangunan rumah ibadah serta perbaikan infrastruktur jalan menuju Kawasan Tangkahan.

Pemerintahan Desa Namosialang dan Desa Sie Serdang memiliki Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dengan kepentingan pembuatan peraturan terkait dengan

pengembangan objek wisata Tangkahan di wilayah desa masing-masing. Hal ini dikarenakan dua desa tersebut mengapit kawasan Tangkahan. Kedua desa juga hanya dipisahkan oleh Sungai Tangkahan sebagai batas administratifnya. Pemerintahan desa memiliki kekuasaan dalam pembuatan peraturan tentang pengelolaan objek wisata di desa yang berpedoman kepada peraturan daerah. Salah satunya menyediakan lahan untuk pengembangan area wisata dan terlibat dalam kegiatan pengembangan objek wisata sebagai pelaku usaha ekowisata.

Tokoh masyarakat terdiri atas penduduk lokal, tokoh desa, tokoh adat. Dalam hal ini, masyarakat utamanya adalah penduduk yang berdomisili di desa sekitar Tangkahan. Namun tidak menutup kemungkinan terdapat juga individu atau kelompok masyarakat yang berdomisili pada desa di luar lokasi penelitian dimana masyarakatnya memiliki keterkaitan emosional dengan Tangkahan (misalnya masyarakat Karo pada beberapa tempat di luar desa penelitian).

Masing-masing *stakeholder* pada prinsipnya memiliki motif tertentu yang menjadi konsentrasi utama kegiatannya. Hal ini juga berpengaruh terhadap kegiatan Ekowisata Tangkahan. Pengaruh *stakeholder* ini dapat diidentifikasi besar tingkat kepentingan dan pengaruhnya oleh bentuk keterlibatan *stakeholder* dalam ekowisata, ketergantungan *stakeholder*, manfaat yang diperoleh *stakeholder*, program kerja serta peran yang

dimainkan oleh *stakeholder* dalam pengelolaan ekowisata. *Stakeholder* dikelompokkan ke dalam kuadran *stakeholder mapping*, yaitu menggunakan matriks pengaruh dan kepentingan berdasarkan besarnya tingkat pengaruh dan kepentingan dalam pengelolaan ekowisata.

Peran *stakeholders* dibedakan menjadi empat peran, yaitu peran dalam perlindungan sumber daya, pemberdayaan masyarakat setempat, penyediaan jasa pariwisata, serta penyediaan data dan informasi. Lembaga pemerintah memainkan peran perlindungan sumber daya (pengawasan dan pengelolaan sumber daya pariwisata dan lingkungan), penyediaan jasa pariwisata (memperbaiki jalan atau akses ke kawasan wisata), penyediaan data dan informasi (mengumpulkan data obyek wisata, publikasi atau promosi), dan pemberdayaan masyarakat lokal (membentuk kelompok sadar wisata). Lembaga swasta memiliki peran dalam penyedia kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, bantuan dalam pengelolaan sumber daya destinasi wisata, penyediaan jasa pariwisata (penyediaan akomodasi, restoran/tempat makan, pro-

gram pariwisata, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan pengunjung), serta penyediaan data dan informasi melalui penyediaan sarana promosi (*billboard, website, leaflet*). Peran kelompok masyarakat adalah sebagai sumber daya perlindungan melalui penanaman, perlindungan hutan, serta menghindari perburuan satwa liar dan *illegal logging* (Muntasib, 2009; Arifin *et al*, 2009; Ekayani *et al*, 2017). Kelompok masyarakat membentuk organisasi pecinta alam atau organisasi perlindungan warisan sejarah budaya yang banyak melakukan usaha-usaha konservasi yang menjadi Objek Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) (Damanik dan Weber, 2006).

Hasil Penilaian tingkat kepentingan *stakeholder* terhadap pengelolaan ekowisata di Tangkahan tersaji pada Tabel 2. Sedangkan hasil Penilaian tingkat pengaruh *stakeholder* terhadap pengelolaan ekowisata di Tangkahan pada Tabel 3. Ilustrasi pada Tabel 3 menunjukkan bahwa *stakeholder* yang berkepentingan dan berpengaruh dalam ekowisata tangkahan bervariasi sesuai dengan peran dan motivasi dari masing-masing *stakeholder*.

Tabel 2. Tingkat kepentingan *stakeholder* Ekowisata Tangkahan

No	<i>Stakeholder</i>	P1	P2	P3	P4	P5	Nilai
1	BBTNGL	5	5	4	4	5	23
2	Dinas Pariwisata	5	4	4	4	3	18
3	Desa namo Sialang	2	2	2	2	2	10
4	Desa Sei Serdang	2	2	2	2	2	10

Tabel 2. Tingkat kepentingan *stakeholder* Ekowisata Tangkahan (*lanjutan*)

No	<i>Stakeholder</i>	P 1	P2	P3	P4	P5	Nilai
5	LPT	4	3	3	4	4	18
6	CRU	2	1	2	1	1	7
7	PTPN II	3	1	2	1	1	8
8	Tokoh masyarakat	3	2	2	2	1	10
9	<i>Rangger</i>	4	3	3	2	4	16
10	CTO Sumatera Tour & Travel	4	4	3	2	2	15
11	CTO Bukit Lawang Tour	4	4	2	2	3	15

Sumber: Data Primer, diolah (2021)

Keterangan:

5:sangat tinggi, 4:tinggi, 3: cukup tinggi, 2: kurang tinggi, 1:rendah

P1: Keterlibatan *stakeholder* dalam kegiatan ekowisata di Tangkahan,P2: Manfaat pengembangan ekowisata di tangkahan bagi *stakeholder*,P3: Peran *stakeholder* dalam kegiatan ekowisata di Tangkahan,P4: Program *stakeholder* dalam kegiatan ekowisata di Tangkahan, danP5: tingkat ketergantungan *stakeholder* ekowisata di tangkahan.Tabel 3. Tingkat pengaruh *stakeholder*

No	<i>Stakeholder</i>	P1	P2	P3	P4	P5	Nilai
1	BBTNGL	5	4	3	3	2	20
2	Dinas Pariwisata	3	3	2	2	1	19
3	Desa namo Sialang	5	4	5	4	4	8
4	Desa Sei Serdang	5	4	5	4	4	8
5	LPT	4	4	3	3	2	16
6	CRU	3	3	4	4	2	16
7	PTPN2	1	1	2	2	1	7
8	Tokoh Masyarakat	3	2	2	2	1	7
9	<i>Rangger</i>	2	3	1	1	1	8
10	CTO Sumatera Tour & Travel	2	2	1	1	1	7
11	CTO Bukit Lawang Tour	3	2	2	1	1	9

Keterangan:

5: sangat tinggi; 4: tinggi; 3: cukup tinggi; 2: kurang tinggi; 1: rendah

P1: Pengaruh *stakeholder* terhadap kegiatan ekowisata di Tangkahan,P2: Kontribusi dan peran *stakeholder* dalam kegiatan ekowisata di Tangkahan,P3: kapasitas kelembagaan/SDM yang ditugaskan oleh *stakeholder* dalam kegiatan ekowisata di Tangkahan,

P4: Kemampuan *stakeholder* berinteraksi dengan *stakeholder* lainnya dalam kegiatan ekowisata, dan

P5: Kemampuan *stakeholder* melaksanakan pengembangan ekowisata di Tangkahan

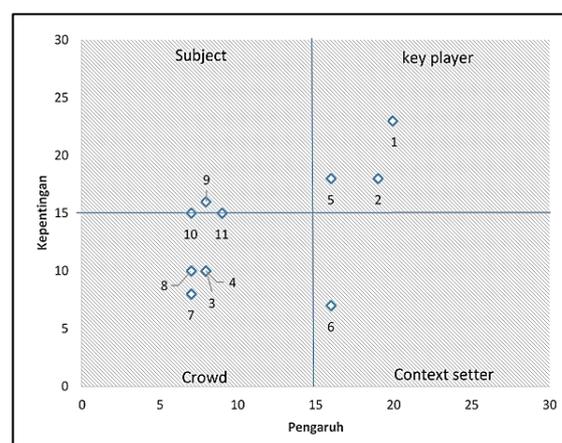
ANALISIS DAN ALTERNATIF

SOLUSI

Kolaborasi partisipatif masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan Ekowisata Tangkahan menjadi nilai lebih dibandingkan dengan kawasan ekowisata lainnya. Menurut Wall (1997), suatu kawasan ekowisata harus dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi masyarakat lokal, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, dan memberikan nilai keuntungan bagi masyarakat lokal. Selain itu, *sociocultural sustainability* merupakan salah satu tujuan utama dalam ekowisata. Untuk mencapainya, kegiatan ekowisata harus dapat melibatkan masyarakat lokal baik dalam kegiatan perencanaan, pengembangan maupun pengelolaannya. Burhanudin (2012) dan Widiyanti *et al.*, (2017) juga mengungkapkan bahwa adanya pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan ekowisata sedikit banyak dapat mempengaruhi stabilitas kawasan tersebut.

Aspek-aspek keterlibatan dalam pengelolaan ekowisata Tangkahan meliputi berbagai pihak yang saling bersinergi, yaitu pemerintahan, masyarakat, dan non-pemerintahan guna menopang jalannya pengembangan ekowisata tersebut. Pemetaan sinergi dan keterlibatan didapat setelah mengombinasikan data-data pengaruh, kepentingan serta pihak atau tokoh yang

terlibat dalam pengembangan ekowisata Tangkahan, kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk gambar *stakeholder grid*, maka selanjutnya diperoleh ilustrasi yang berkaitan dengan tingkat kepentingan dan pengaruh untuk seluruh *stakeholder* secara bersamaan yang menggambarkan posisi dan peranan *stakeholder* dalam pengembangan ekowisata di Tangkahan yang disajikan seperti Gambar 1 berikut.



Keterangan:

1. BBTNGL; 2. Disbupar Kabupaten Langkat; 3. Desa Namosialang; 4. Desa Sei Serdang; 5. LPT;
6. CRU; 7. PTPN II; 8. Tokoh Masyarakat; 9. Ranger; 10. CTO Sumatera; 11. CTO Bukit Lawang

Gambar 1. Pemetaan *stakeholder* Ekowisata Tangkahan

Pengaruh menunjukkan tingkat kekuasaan yang dimiliki *stakeholder* terhadap jalannya program atau proyek. Hal tersebut dapat diuji melalui cara-cara pengendalian dan penguasaan mereka terhadap proses-proses pengambilan keputusan secara langsung maupun penguasaan terhadap jalannya program/proyek. Sedangkan kepentingan

berkaitan dengan ketergantungan pada keterlibatan aktif yang diberikan oleh kelompok *stakeholder* bersangkutan. *Stakeholder* dipetakan ke dalam empat pihak, yakni *subject*, *key player*, *crowd*, dan *context setter* dengan penjabaran berikut:

a) *Subject*

Subject merupakan pihak dengan kepentingan sangat tinggi, namun memiliki pengaruh rendah. Pihak-pihak yang termasuk kelompok *subject* adalah *ranger*, CTO Sumatera, dan CTO Bukit Lawang. Pihak-pihak tersebut tidak banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, namun pasti terlibat dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, diperlukan upaya khusus agar pihak-pihak tersebut menjadi yakin bahwa kebutuhan mereka sejalan dengan jalannya pengembangan pengelolaan Ekowisata Tangkahan. CTO Sumatera dan CTO Bukit Lawang dibentuk oleh LPT guna memfasilitasi penyediaan akomodasi, interpreter bagi pengunjung, dan paket-paket wisata yang menarik. Hal ini sehubungan dengan *ranger* yang dibagi menjadi tiga divisi, yakni divisi konservasi, interpretasi dan SAR. Divisi konservasi *ranger* bertugas untuk menjaga kelestarian lingkungan, salah satunya melalui bank sampah dan sosialisasi ke masyarakat sekitar terkait kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di Tangkahan memiliki

jadwal rutin untuk membersihkan sampah yang ada di kawasan Ekowisata. Divisi interpretasi *ranger* bertugas untuk membawahi *tour guide* dan pemandu wisata. Sedangkan divisi SAR bertugas untuk menjaga keamanan. Kelompok *subject* memiliki pengaruh yang kecil karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak berhubungan langsung dengan *stakeholder* namun berhubungan langsung dengan kegiatan dan keselamatan pengunjung Ekowisata Tangkahan. Hal inilah yang membuat kelompok *subject* memiliki kepentingan yang sangat tinggi dengan pengaruh yang rendah. Dalam pelaksanaannya, kelompok *subject* juga melaksanakan rencana dan kebijakan yang dibentuk oleh *stakeholder*.

b) *Key player*

Key player adalah *stakeholders* yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi. *Stakeholders* kelompok *key player* merupakan kelompok yang paling kritis karena memiliki nilai penting dan pengaruh yang tinggi terhadap keberhasilan suatu manajemen dan pengelolaan. Lembaga BBTNGL, Disbupar Kabupaten Langkat, dan LPT memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan tertinggi sehingga diposisikan sebagai *key player*. Kelompok ini memegang peran aktif, sekaligus peran kunci dalam pengaruh dan pengembangan Ekowisata Tangkahan. BBTNGL berperan sebagai

pengelola wisata berbasis alam paling utama di Kabupaten Langkat, bersamaan dengan Disbupar Langkat yang juga berperan dalam menciptakan ketergantungan dan kemandirian ekonomi bagi masyarakat lokal serta sektor swasta yang terlibat dalam pariwisata. BBTNGL sangat proaktif dalam mengembangkan kemitraan dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan. Saat ini, TNGL bahkan telah menandatangani MoU dengan pemerintah Kabupaten Langkat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam konservasi TNGL. Selain itu, BBTNGL bersama dengan LPT juga berupaya dalam memitigasi kendala-kendala utama yang terdapat di dalam pengelolaan TNGL seperti pembangunan fasilitas dan infrastruktur, pemungutan ilegal produk hasil hutan non kayu, ketiadaan penelitian terapan, pelanggaran batas, dan lain sebagainya. Pihak-pihak tersebut selalu terlibat aktif dalam segala lingkup pengelolaan, pertimbangan, dan perumusan yang berkaitan dengan pengembangan Ekowisata Tangkahan.

c) *Crowd*

Crowd merupakan *stakeholders* dengan kepentingan dan pengaruh yang rendah. *Stakeholders* ini membutuhkan sedikit pengawasan dan evaluasi, namun dengan prioritas yang rendah. Desa Namosialang, Desa Sei Serdang, PTPN

II, dan tokoh masyarakat masuk ke dalam kategori *crowd* yang berarti pihak-pihak tersebut berperan sebagai pendukung dalam pengembangan Ekowisata Tangkahan. Adanya pendukung dalam pengelolaan dan pengembangan Ekowisata Tangkahan menjadi penting karena menjadi *support system* dan penghubung kolaborasi kemasyarakatan yang dilakukan oleh pihak *key player*. Kolaborasi kemasyarakatan dilakukan untuk memberdayakan masyarakat sekitar melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan penyediaan akses kepada pemanfaatan Kawasan Suaka Alam (KSA) atau Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Hal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 108 Tahun 2015 tentang pengelolaan KSA dan KPA yang meliputi:

- Pengembangan desa konservasi
- Pemberian akses untuk memungut hasil hutan bukan kayu di zona atau blok tradisional atau pemanfaatan tradisional
- Fasilitasi kemitraan antara pemegang izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat
- Pemberian izin perusahaan jasa wisata alam

d) *Context setter*

Context setter merupakan pihak-pihak yang memiliki pengaruh tinggi, namun memiliki kepentingan yang rendah.

Pihak yang termasuk kelompok *context setter*, yakni pihak CRU. Kehadirannya bersama dengan masyarakat dapat secara cepat merespons konflik di daerah-daerah kritis. CRU berperan penting sebagai salah satu program konservasi untuk melindungi dan menjaga kawasan hutan berbasis masyarakat, mendukung konservasi di tingkat mukim dan membantu memperluas kapasitas konservasi lokal, serta menjadi penghubung konsep konservasi *ex-situ* dan *in-situ*. Oleh karenanya, kelompok *context setter* sangat mungkin untuk memberikan intervensi dalam berjalannya pengembangan dan pengelolaan Ekowisata Tangkahan. Pihak yang berada pada level tersebut tetap diberikan perlakuan khusus, minimal dalam rangka peran keterlibatan dan diskusi untuk pengembangan pengelolaan Ekowisata Tangkahan.

Para pemangku kepentingan pada umumnya memiliki peran dan fungsi, serta pengaruh yang berbeda-beda. Pada dasarnya, kelompok masyarakat merupakan pemangku kepentingan yang paling lemah secara struktur dan fungsi. Semakin jauh pemangku kepentingan dari pusat kekuasaan, maka akan semakin lemah kedudukannya. BBTNGL, Disbudpar Kabupaten Langkat, dan LPT bertanggungjawab secara langsung dalam pengelolaan dan pengembangan Ekowisata Tangkahan. Pihak-pihak tersebut memiliki kewenangan dan tanggung jawab

untuk mewujudkan pengelolaan berbasis masyarakat. Desa Namosialang dan Desa Sei Serdang merupakan Desa yang memiliki akses terdekat dengan kawasan Ekowisata. Sebagian besar masyarakat desa tersebut memanfaatkan obyek wisata Tangkahan dengan menawarkan jasa pemandu wisata atau jasa sewa peralatan.

Pengelolaan dan pengembangan Ekowisata Tangkahan bersifat dinamis yang didukung dengan peraturan pengembangan wisata alam dan prosedur penyelenggaraannya. Hal ini mengacu pada PP No. 36 Tahun 2010 tentang tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Dalam hal ini pemerintah telah memfasilitasi pemanfaatan KSA dan KPA dengan izin khusus (berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan kementerian kehutanan) seperti IUPJWA (Izin Usaha Pengusahaan Jasa Wisata Alam) dan/atau IUPSWA (Izin Usaha Pengusahaan Sarana Wisata Alam). Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat yang hidup bersebelahan dengan kawasan dalam menyokong keberlanjutan KSA dan KPA. Pemberdayaan masyarakat didahului dengan peningkatan kapasitas masyarakat yang dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, penguatan kelembagaan dan perubahan perilaku.

Stakeholders melalui otoritas TNGL telah mempublikasikan rencana pengelolaan kolaboratif dalam pengembangan Ekowisata Tangkahan. Pengelolaan tersebut dapat dilaksanakan dengan bekerja sama berbagai pemangku kepentingan konservasi dan pariwisata termasuk mitra lokal dan nasional yang terdiri atas pemerintahan, masyarakat dan organisasi-organisasi. Pengembangan Ekowisata juga akan menjalankan strategi untuk memperkuat jaringan kelembagaan yang ada saat ini dengan merangkul berbagai *stakeholders* lokal dan nasional. Hal ini guna memastikan pendekatan partisipatif dalam pelaksanaannya. Proses tersebut juga akan mengikutsertakan Kantor Pengelola TNGL dengan NGO, termasuk di antaranya melibatkan *ranger* dan CTO yang menjadi bagian dari pengelola ekowisata, kemudian terdapat juga kelompok kerja dan dinas-dinas terkait di tingkat kabupaten. Pendekatan kolaborasi antara *stakeholders* ini diharapkan mampu memperbaiki konflik sosial ekonomi selaras dengan rencana pengembangan yang telah dirancang oleh pengelola Ekowisata Tangkahan.

DAFTAR PUSTAKA

- [BBTNGL] Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. 2011. Buku literatur potensi flora di Taman Nasional Gunung Leuser, Medan.
- Arifin, H.S., Munandar, A., Nurhayati, H.S.A., Kaswanto, R.L., 2009. *Potensi Kegiatan Agrowisata di Perdesaan (Buku Seri IV: Manajemen Lanskap Perdesaan bagi Kelestarian dan Kesejahteraan Lingkungan)*. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Burhanudin. 2012. *Review Tata Ruang Kawasan Ekowisata Tangkahan*. Medan: YOSL-OIC.
- Damanik, J., Weber, H.F. 2006. *Perencanaan Ekowisata: Dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: Andi.
- Ekayani, M., Nuva, Yasmin, R., Shaffitri, L.R., Idris, B. 2017. Taman nasional untuk siapa? Tantangan membangun wisata alam berbasis masyarakat di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, 1(1), 46-52. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jkebijakan/article/view/10279>.
- Febriana, N.P.R., Kaswanto, R.L. 2015. Tourism track management of cibeureum waterfall as a provider of landscape beautification service at Gunung Gede Pangrango National Park. *Procedia Environmental Sciences*, 24. 174-183. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2015.03.023>.
- Ginting, Y., Dharmawan, A.H., Sekartjajarini, S. 2010. Interaksi komunitas lokal di Taman Nasional Gunung Leuser, studi kasus Kawasan Ekowisata Tangkahan, Sumatera Utara. *Sodality: Jurnal*

- Sosiologi Pedesaan*, 4(1): 39-58.
<https://doi.org/10.22500/sodality.v4i1.5853>.
- Muntasib, E.K.S.H. 2009. Tata kelola pariwisata alam di Indonesia. Seminar Kebijakan, Tantangan dan Peluang Pariwisata Alam di Indonesia. Di dalam Seminar Kebijakan, Tantangan dan Peluang Pariwisata Alam di Indonesia. Asosiasi Pariwisata Alam Indonesia (APAI). Gedung Manggala Wanabakti. Jakarta. 21-22 Juli 2009.
- Muthiah, J., Soekmadi, R., Nurrochmat, D.R. 2015. Dampak kegiatan wisata alam bagi masyarakat dalam Kawasan Taman Nasional Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, 2(1), 60-69.
<https://journal.ipb.ac.id/index.php/jkebijakan/article/view/10393>.
- Rahayu, S., Badiah, B. 2021. Strategi konservasi tumbuhan hoja di Bodogol, cagar biosfer Taman Nasional Gunung Gede Pangrango melalui promosi ekowisata. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, 8(3), 176-187.
<https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v8i3.28034>.
- Widiyanti, H., Soekmadi, R., Santoso, N. 2017. Strategi peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dalam pengembangan ekowisata di Taman Wisata Alam Kawah Ijen. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, 2(3), 202-213.
<https://journal.ipb.ac.id/index.php/jkebijakan/article/view/12574>.